

Politik Ekspansi Sultan Agung di Wilayah Timur Tanah Jawa (1614-1625 M)

Nurul Lailia Afida

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Corresponding author: nurulafidah2120@gmail.com

Dwi Susanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

dwisusanto@uinsa.ac.id

Nuriyadin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nuriyadin@uinsa.ac.id

Abstract: Sultan Agung is the third king of the Mataram Kingdom who has brought Mataram to the peak of its glory. One of his successes was to expand his territory in various regions in Java, one of which was in East Java through the politics of expansion. This study aims (1) determine the condition of the Islamic Mataram Kingdom under the reign of Sultan Agung (2) explain the expansion politics carried out by Sultan Agung in the eastern region of Java, (3) analyze the strategy of Sultan Agung in carrying out the expansion policy in the eastern region of Java. This research uses qualitative research methods by collecting data sources through literature study. The results are (1) The leadership of Sultan Agung has brought Mataram to rapidly develop into the largest kingdom in Java and the archipelago in 1614-1645. This proves that Sultan Agung brought Mataram to excel in several fields such as politics, territorial expansion, economy, and religion (2) Beginning in 1614, Sultan Agung launched his first military attack on eastern Java as a political target for his expansion. Then in 1615-1625, Sultan Agung succeeded in conquering East Java areas such as Wirasaba, Siwalan and Lasem, Pasuruan, Tuban, and Surabaya (3) The expansion strategy to East Java was to understand the road, understand the seasons and weather, control the terrain, give command, and disciplined on the rules of the war leader.

Keywords: *Mataram, Sultan Agung, Expansion Politic, East Java.*

PENDAHULUAN

Fenomena hubungan antara politik dan biokrasi di Indonesia sudah menjadi wacana yang menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya diibaratkan sebagai “dua mata uang” yang artinya tidak dapat dipisahkan namun mereka berdiri sendiri. Politik sendiri memiliki definisi sebagai media interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama dengan masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah tertentu. Pemerintah menjadi unsur dalam proses politik yang memuat kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini pemerintah menjalankan suatu mekanisme penetapan aturan-aturan berperilaku bagi masyarakat yang semuanya dimaksudkan demi menacapai tujuan bersama (Surbakti, 2010).

Selain politik, birokrasi juga termasuk dalam sistem politik tepatnya pada sistem penataan pemerintahan. Birokrasi atau sering disebut administrasi publik merupakan suatu sistem dalam penataan sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Birokrasi bekerja dengan orientasi secara dinamis untuk melaksanakan sistem peraturan undang-undang dan secara disiplin dalam menanggapi masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*) agar dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat. (Thoha, 2016). Politik dan birokrasi akan bekerja sama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Keduanya akan mewujudkan good government dengan menjalankan tiga unsur komponen yaitu rakyat, pemerintah dan penguasa secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding agar tidak terjadi penyimpangan dan masalah di dalamnya (Thoha, 2016).

Hubungan politik-biokrasi di Indonesia sudah terjalin sudah lama. Jika ditinjau dari segi historis, maka hubungan politik-biokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode Pra-Kolonial, Kolonial, dan Pasca-Kolonial. Namun peneliti menyorot hubungan politik-biokrasi di Indonesia pada periode Pra-Kolonial dimana Indonesia masih identik dengan kerajaan-kerajaan lokal baik yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada masa Pra-Kolonial antara lain, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Samudra Pasai, dan sebagainya. Secara umum, sistem pemerintahannya mengarah pada sistem feodalsentralistik. Sistem ini memiliki arti bahwa raja merupakan penguasa tunggal dan harus dipatuhi, segala keputusan baik kebijakan maupun aturan ada di tangan raja, dan rakyat diharuskan untuk patuh dan tunduk pada segala keputusan raja. Kemudian dari sisi biokrasi dapat terorganisir dengan tujuan untuk media komunikasi atas kebijakan dan keputusan raja kepada rakyat. Pada periode ini pola politik yang digunakan adalah politik ekspansi atau kegiatan politik yang lebih mengarah pada penaklukan wilayah-wilayah kerajaan lain di sekitarnya untuk memperluas kekuasaan. Kerajaan-kerajaan besar akan melakukan ekspansi ke luar untuk memperluas wilayahnya dan setelah berhasil raja akan menempatkan orang kepercayaan untuk memimpin wilayah jajahan. Dari sinilah akan terdapat pemimpin-pemimpin lokal sebagai perpanjangan tangan raja sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan raja pada rakyat. Oleh karena itu,

hubungan politik dan biokrasi dalam periode kerajaan tidak seimbang karena biokrasi memiliki kedudukan lemah karena biokrasi lebih loyal kepada raja dibanding bertanggung jawab kepada rakyat (Yudiatmaja, 2015).

Politik-biokrasi masih menjadi suatu topik yang hangat dari beberapa pembahasan, maka peneliti menjadikan alasan mengapa politik-biokrasi menjadi tema pada penulisan ini. hal tersebut didukung dengan adanya hubungan pada masa kerajaan dimana politik dan biokrasi dilaksanakan secara militer atau perang dalam urusan pemerintahan. Salah satunya dengan kegiatan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam hal ini satu dari beberapa kerajaan dipilih peneliti untuk menjadi acuan pembahasan mengenai politik ekspansi yang dilakukan yaitu Kerajaan Mataram Islam. Salah satu pemimpin Kerajaan Mataram yang melakukan misi ekspansi guna memperluas wilayah kekuasaannya adalah Sultan Agung. Meskipun Sultan Agung merupakan pimpinan dari kerajaan yang bercorak Islam tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan ekspansi dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Sultan Agung lahir pada tahun 1592 di Mataram dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Adi Dyah Banowati dari Pajang. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika dan terkenal dengan nama Raden Mas Rangsang saat diangkat menjadi pangeran. Arti Rangsang sendiri adalah mempunyai watak yang penuh dengan kemauan dan keinginan keras untuk pantang menyerah yang tak pernah padam (Subartardjo, 1976). Sultan Agung adalah raja ke-3 dari Mataram Islam yang memiliki peran besar atas kejayaan Kerajaan Mataram Islam dalam masa kepemimpinannya. Selain itu, kontribusi besar Sultan Agung adalah mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa. Sultan Agung dikenal dengan sosok raja yang sakti mandraguna, berwibawa, dan bijaksana (Olthof, 2017).

Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam berada di puncak keemasannya. Artinya Kerajaan Mataram telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu misi perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan Sultan Agung meliputi wilayah tanah Jawa dari paling ujung barat hingga paling ujung timur. Karena pencapaian ini, Sultan Agung merupakan Raja Mataram Islam yang berhasil dalam membawa Kerajaan Mataram Islam di masa kejayaannya. Untuk itu, masih ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang Sultan Agung dalam pencapaian usaha ekspansi wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Salah satu hal yang menarik adalah ekspansi

wilayah Sultan Agung di bagian timur Jawa. Karena salah satu wilayah yang ditaklukkan Sultan Agung adalah wilayah yang paling kuat dengan kekuatan politik dan militernya adalah Surabaya serta wilayah-wilayah timur lainnya seperti Pasuruan, Tuban, dan Madura berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung.

METODE PENELITIAN

Kajian peristiwa sejarah merupakan penggambaran dan penggarapan atas sebuah peristiwa lampau dengan menganalisis, mengembangkan, dan menyusun fakta sejarah berdasarkan komponen-komponen yang mendukung dalam kajian tersebut. Dalam hal ini, kajian sejarah perlu bantuan metodologi penelitian untuk membantu dalam proses penganalisisan, pengembangan, dan penyusunan secara operasional sehingga relevan dan cocok dengan objek kajian yang dipilih. Peran metodologi penelitian adalah sebagai alat-alat analisis pada sumber dan informasi yang didapat dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur di dalamnya agar membantu dalam proses penulisan sejarah (Kartodirjo, 1992).

Pada dasarnya metodologi penelitian sejarah adalah Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Penulis menggunakan metode tersebut dalam membantu dalam proses penganalisisan dan penulisan rekonstruksi peristiwa lampau. Berikut penjelasan mengenai empat proses dalam metodologi penelitian sejarah :

1. Heuristik / Pengumpulan Data dan Sumber

Proses yang pertama adalah penulis mencari dan mengumpulkan data atau sumber- sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti melalui berbagai media seperti media tulis berupa buku dan artikel kemudian media lisan seperti wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan wawasan untuk memperoleh informasi serta media benda berupa benda peninggalan sejarah yang memiliki keterangan yang berhubungan dengan topik penulisan (Sulasman, 2014).

Tahap pengumpulan data dan sumber dalam penelitian ini menggunakan media tulis atau studi pustaka. Artinya penelitian ini menggunakan pedoman buku, jurnal, artikel, maupun sumber pustaka lainnya sebagai media pengumpulan data dan sumber yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku karya W.L

Olthof yang berjudul Babad Tanah Jawi. Selain karya Olthof, peneliti juga mengambil sumber data melalui buku karya De Graaf yang berjudul Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Kemudian sumber data sekunder yang relevan dengan topik dari penelitian ini adalah beberapa buku yang terkait dengan politik ekspansi Sultan Agung di Jawa Timur seperti buku Kitab Terlengkap Sejarah Mataram karya Seodjipto Abimanyu, buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia karya Daliman, dan buku karya Sartono Kartodirjo yang berjudul Pengantar Sejarah Baru 1500-1900: Dari Emperium Sampai Imperium.

2. Verifikasi / Kritik Terhadap Sumber

Setelah data atau sumber-sumber terkumpul, proses selanjutnya adalah menyaring secara kritis terhadap data dan sumber tersebut agar sebuah fakta dapat terjaring sesuai dengan pilihan peneliti. Hal ini dilakukan agar penulis tidak begitu saja menerima sumber data informasi melainkan pengujian terhadap kebenaran atau ketepatan yang terkandung dalam sumber tersebut. Inilah yang disebut verifikasi atau kritik sumber dari proses metodologi penelitian.

Verifikasi atau kritik sumber dapat dilakukan terhadap sisi eksternal dan internal dari sumber. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh fakta yang akurat dan tidak terjadi keraguan apakah data sumber ini palsu atau tidak. Dalam kritik sumber eksternal dan internal, dapat dilakukan dengan melakukan kritik sumber dari aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Pemeriksaan yang ketat akan dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh keotentikan dan integritas dalam sumber. Dari sumber yang didapatkan oleh peneliti, dapat memberikan bukti bahwa peristiwa sejarah tersebut nyata adanya. Dibuktikan pada buku Babad Tanah Jawi karya W.L Olthof yang memuat kepemimpinan Sultan Agung dan Kerajaan Mataram Islam. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber dari aspek-aspek dalam yaitu isi dari sumber sejarah. Pengujian dan penganalisisan dari isi sumber sejarah dilakukan agar mendapat kredibilitas mengenai fakta dari sumber tersebut. Kritik sumber dari aspek dalam (intern) dilakukan peneliti dengan cara membandingkan antara buku Kitab Terlengkap Sejarah Mataram karya Seodjipto Abimanyu dengan objek bahwa Sultan Agung dalam memperluas kekuasaannya dengan menggunakan pola politik ekspansi. Hal ini relevan dan sama dengan isi dalam buku karya Olthof Babad Tanah Jawi yang menyatakan hal serupa (Sjamsuddin, 2012).

3. Interpretasi / Penafsiran

Interpretasi atau penafsiran adalah kemampuan dari seorang sejarawan dalam menguraikan fakta-fakta sejarah berdasarkan pemahaman, gambaran, dan tangkapan sehingga membentuk rangkaian sebuah kejadian (Sulasman, 2014). Dalam penelitian mengenai “Politik Ekspansi Sultan Agung di Wilayah Timur Tanah Jawa (1614-1625 M)” telah dianalisis dengan menggunakan teori politik dan teori strategi perang yang membantu dalam menganalisis proses politik ekspansi yang dijalankan oleh Sultan Agung. Kemudian dibantu dengan pendekatan historis dan ilmu sosial untuk menjelaskan bagaimana misi politik ekspansi Sultan Agung secara sistematis.

4. Historiografi / Proses Penulisan Sejarah

Historiografi merupakan proses terakhir dari metode penelitian dimana data atau sumber sejarah sudah melewati proses penyaringan, pengujian, dan penafsiran yang kemudian dipaparkan sebagai kesimpulan yang relevan menjadi sebuah bentuk penulisan sejarah (Sjamsuddin, 2012). Politik ekspansi Sultan Agung di wilayah timur Tanah Jawa menjadi objek dalam penelitian ini tersusun dan tertulis menjadi rangkaian yang sistematis. Mulai dari kondisi Kerajaan Mataram Islam pada masa kepemimpinan Sultan Agung, proses politik ekspansi Sultan Agung di wilayah timur Tanah Jawa, dan strategi yang dibuat Sultan Agung dalam menjalankan politik ekspansinya di wilayah timur Tanah Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kerajaan Mataram Di Bawah Kepemimpinan Sultan Agung

1. Bidang Politik

Sultan Agung memiliki wawasan luas mengenai politik dan jauh ke depan. Artinya Sultan Agung merupakan seorang pemikir politik dan praktisi dalam bidang politik. Terbukti dalam masa pemerintahannya, Sultan Agung merumuskan konsep politik berupa doktrin Kagunganbinataraan. Konsep politik dengan doktrin Kagunganbinataraan menjelaskan mengenai kekuasaan raja Mataram bersifat tunggal, bulat, dan utuh. Artinya kekuasaan raja tidak dapat tersaingi, tidak terbagi, dan merupakan sebuah totalitas baik secara intern dan ekstern. Begitupun kedudukan raja berada di puncak piramida kerajaan sehingga pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang raja. Dengan demikian, yang menjadi inti dari konsep politik

Kagunganbinarataan adalah dalam konsep kekuasaan Jawa kedudukan raja bersifat absolut, tidak terbatas, dan sangat besar. Selain itu, kekuasaan raja juga bersifat totaliter, tidak dapat terbagi, dan tidak ada yang menyaingi (Abimanyu, Kitab Terlengkap Mataram, 2015). Konsep Kagunganbinarataan yang dibangun Sultan Agung memiliki paduan antara konsep kekuasaan raja menurut Islam dan ajaran Jawa. Dalam Islam, Sultan Agung menggunakan konsep kenegaraan berdasarkan hak ilahi. Konsep ini memiliki penjelasan bahwa raja berkedudukan sebagai khalifatullah atau wali Allah di dunia. Kemudian ajaran Jawa ditambahkan Sultan Agung dalam konsep Kagunganbinarataan adalah kekuasaan negara yang tertinggi dipegang oleh raja (wenang wisesa ing sanagari) dan bersifat satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah, dan tidak terbagi-bagi (ngendi ana surya kembar) (Daliman, 2012).

Selain konsep politik Kagunganbinarataan, Sultan Agung juga membentuk sistem dan struktur pemerintahan Mataram. Sistem dan struktur pemerintahan Mataram didasarkan pada konsep kewilayahan yang terbagi mengikuti pola lingkaran konsentris dengan keraton sebagai pusatnya. Hal ini merupakan penerusan tradisi yang berlangsung sangat lama mengenai pandangan orientasi pada keraton sebagai pusat pemerintahan sebuah kerajaan. Maka dipilihlah kata Mataram sebagai pusat kerajaan karena Mataram merupakan nama daerah atau tempat dimana kerajaan Mataram mulai didirikan (Daliman, 2012).

2. Ekspansi Wilayah

Keberhasilan Sultan Agung dalam menyosong konsep politik Kagunganbinarataan membawa dampak besar bagi Kerajaan Mataram. Bukan hanya berkembang pesat dalam berbagai bidang, tapi Sultan Agung dapat menundukkan sejumlah wilayah di sekitar Mataram di bawah pengaruh kekuasaannya. Sehingga wilayah kekuasaan yang dimiliki Sultan Agung berada di ujung barat pulau Jawa hingga ujung timur pulau Jawa. Meskipun begitu, banyak sekali wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Hal ini membuat Sultan Agung berusaha untuk menyatukan kembali wilayah yang terlepas dari Mataram dengan menaklukkan kembali wilayah tersebut dan kembali dalam naungan Mataram. Selain mempersatukan kembali wilayah-wilayah kekuasaan Mataram yang terlepas, Sultan Agung juga berhasil menundukkan banyak daerah-daerah kekuasaan baru secara

berturut-turut, seperti Wirasaba (1615), Lasem (1616), Pasuruan (1617), Gresik (1618), Tuban (1619), Madura

(1624), Surabaya (1625), Giri (1636), dan Blambangan (1639). Kemudian di bagian barat pulau Jawa, secara keseluruhan Sultan Agung berhasil menduduki daerah tersebut kecuali Banten dan Batavia. Selain di pulau Jawa, Sultan Agung juga menguasai beberapa wilayah di luar pulau Jawa seperti Palembang, Jambi, Banjarmasin, dan Makasar. Dengan menguasai daerah-daerah tersebut menjadikan kedudukan Mataram semakin kuat dan kokoh serta wilayah kekuasaannya semakin meluas (Abimanyu, Kitab Terlengkap Mataram, 2015).

3. Bidang Ekonomi

Kerajaan Mataram secara geografis terletak di pedalaman sehingga kehidupan ekonominya bersifat agraris. Oleh karena itu, Sultan Agung memiliki pandangan bahwa sektor pertanian dijadikan sumber utama dalam ekonomi negara dan sumber kekayaan kerajaan. Pertanian yang dimaksud adalah daerah persawahan yang dijadikan sebagai salah satu usaha Sultan Agung dalam memperkuat ekonomi kerajaan. Usaha yang dimaksud adalah menguasai daerah-daerah persawahan yang luas kemudian dimanfaatkan sebagai sumber produksi padi dan perdagangan beras (Daliman, 2012).

Peranan perdagangan beras dalam ekonomi Kerajaan Mataram sangat penting. Kerajaan Mataram dapat melakukan kegiatan impor dari luar negeri untuk berbagai barang kebutuhan seperti kain katun, kain sutera, porselin, permata, rotan, dan sebagainya dengan menggunakan beras. Kemudian juga peralatan perang seperti senjata meriam atau kanon didapatkan dengan beras. Selama abad ke-17, Mataram menjadi pemasok utama kebutuhan beras bagi daerah-daerah lain di Nusantara, Portugis di Malaka, dan Belanda di Batavia. Dan Mataram memegang penuh kegiatan monopoli perdagangan beras sehingga seluruh wilayah kerajaan harus memasok berasnya ke Mataram. Pusat pelabuhan utama ekspor beras adalah di Jepara sehingga untuk semua kegiatan ekspor beras harus melalui pelabuhan Jepara. Karena peranan penting perdagangan beras maka Mataram menjadikan beras sebagai senjata bagi menghadapi lawan-lawannya seperti Surabaya dan Belanda. Akibatnya Belanda harus mendatangkan beras dari India, Siam, dan Jepang (Daliman, 2012).

4. Bidang Agama

Sultan Agung merupakan sosok raja Mataram yang taat dalam menjalankan agama Islam. Tak ayal, Sultan Agung diberi gelar Sayyidin Panatagama yang berarti pengurus agama, pengatur agama, dan wakil Allah (khalifatullah) dalam mengatur agama Islam. Dengan kedudukan sebagai raja yang taat pada agama Islam maka agama Islam dijadikan sebagai agama resmi di Kerajaan Mataram. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memeluk agama Islam maka rakyat juga mengikuti apa yang dilakukan pemimpinnya. Artinya Sultan Agung meresmikan agama Islam sebagai agama kerajaan sehingga rakyat juga mengikuti keputusan yang diambil Sultan Agung. Inilah yang disebut agama ageing aji yang artinya agama yang dipeluk oleh rakyat adalah agama rajanya. Selain menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, Sultan Agung melakukan reformasi dalam bidang agama. Salah satunya adalah menurunkan kedudukan ulama atau wali dalam kerajaan. Sebelum Sultan Agung naik tahta, kedudukan ulama atau wali lebih tinggi daripada raja sehingga memiliki pengaruh yang sama bahkan lebih besar dari raja (Abimanyu, 2017)

Kemudian Sultan Agung menjadikan Islam sebagai kemenangan politik. Artinya ketika Sultan Agung berhasil menaklukkan suatu kerajaan, maka kerajaan yang ditaklukkan harus memeluk Islam, mengakui kehebatan Mataram dan tunduk pada Mataram, serta mengirim upeti setiap tahun. Sebagai contoh kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan adalah Kerajaan Palembang, Jambi, Banjarmasin, Goa, Minangkabau, dan Banjar (Abimanyu, 2015)

Ajaran Islam juga diselipkan pada perhitungan tahun oleh Sultan Agung. Dalam perhitungan tahun, Sultan Agung memadukan tradisi pesantren (Islam) dengan tradisi kejawen. Masyarakat pesantren biasanya menggunakan tahun Hijriah, sedangkan masyarakat Jawa menggunakan tahun Saka. Kemudian perpaduan tahun Hijriyah dan tahun Saka berhasil disusun dan diberlakukan oleh Sultan Agung di seluruh Kerajaan Mataram.

Perhitungan tahun ini secara keseluruhan mirip dengan perhitungan Hijriyah yaitu berdasarkan perputaran bulan. Hanya pada awal perhitungan tahun Jawa tetap berdasarkan tahun Saka yaitu 78 masehi (Purwadi, 2014)

Wilayah-wilayah Timur Jawa sebagai Target Politik Ekspansi Sultan Agung

1. Serangan Militer Pertama oleh Sultan Agung (1614 M)

Pada tahun 1614, Sultan Agung meluncurkan serangan militer pertamanya setelah pengukuhan sebagai raja Mataram. Serangan militer ini diluncurkan ke daerah-daerah timur Jawa yang merupakan daerah sekutu Surabaya. Daerah sekutu Surabaya antara lain adalah Pasuruan, Lumajang dan Renong, dan Malang. Hal ini bertujuan agar Mataram mudah dalam misi menaklukkan Surabaya. Karena dengan menundukkan daerah sekutu Surabaya, maka Mataram dengan mudah melakukan serangkaian serangan terhadap Surabaya (Graaf, 1986).

Untuk melancarkan serangan tersebut, Sultan Agung menunjuk Tumenggung Suratani untuk bergerak menuju daerah timur Jawa dengan membawa bala tentara Mataram. Ekspedisi semakin kuat karena adanya kerjasama dari para bupati di daerah pesisir utara serta daerah-daerah lain yang sudah dikuasai Mataram sehingga jumlah prajurit semakin besar dengan perlengkapan perang yang semakin lengkap (Olthof, 2017).

2. Penaklukan Wirasaba (1615 M)

Penaklukan Wirasaba terjadi pada tahun 1615 Masehi yang merupakan pendudukan wilayah terpenting bagi Sultan Agung. Wirasaba (sekarang dikenal dengan nama Mojoagung) merupakan tempat strategis yang terletak di pintu gerbang muara Sungai Brantas. Dan Wirasaba ini juga daerah yang pernah menjadi lokasi Majapahit. Sehingga kemenangan dalam menaklukkan Wirasaba adalah kesempatan emas bagi Sultan Agung untuk menguasai daerah-daerah lainnya dan juga Sultan Agung mengelola serta memimpin sendiri pasukan prajurit Mataram dalam menjaga pertahanan Wirasaba (Riklefs, 2010)

Dalam misi menaklukkan Wirasaba oleh Sultan Agung bersiap menuju Wirasaba. Kemudian Sultan Agung juga mengutus Ki Tumenggung Martaraya untuk segera mengarahkan pasukan bala-tentara Mataram beserta bala tentara daerah pesisir dan wilayah lain yang sudah dikuasai Mataram untuk berangkat ke Wirasaba. Bala tentara Wirasaba sudah menyambut kedatangan pasukan Mataram dengan serangan tembakan meriam dan tombak sehingga banyak pasukan Mataram tewas dan terluka. Namun kegigihan pasukan Mataram tetap berlanjut untuk menyerbu Wirasaba. Keberuntungan kali ini berpihak pada Mataram, benteng pertahanan Wirasaba dapat

dihancurkan dan pasukan Mataram berhasil memasuki Wirasaba. Prajurit Wirasaba kewalahan menghadang banyaknya serangan dari Mataram. Akibatnya pertahanan Wirasaba melemah. Runtuhnya Wirasaba menjadi keberhasilan pasukan Mataram (Olthof, 2017).

3. Pertempuran di Siwalan dan Lasem (1616 M)

Sultan Agung yang berada di Mataram telah mengetahui dari Adipati Pati bahwa pasukan dari Jawa Timur bergerak menuju Mataram. Dengan segera, Sultan Agung menunjuk Tumenggung Alap-Alap agar mengirimkan bantuan ke daerah Pati. Berangkatlah Tumenggung Alap-Alap beserta bala tentaranya kemudian disusul oleh pasukan dari Sultan Agung sendiri yang berkedudukan di sebelah barat Pajang di bawah pimpinan Tumenggung Martalaya dan Jaya Suponta. Tepat di dusun Siwalan, barisan prajurit Mataram telah bersiap di sebelah timur sedangkan pasukan Jawa Timur berada di sebelah barat. Atas perintah Sultan Agung,

Tumenggung Martalaya memulai penyerangan dengan memotong jalur pemasokkan utama bahan makanan. Akibatnya pasukan sekutu banyak yang menderita kelaparan dan fisik mereka lemah. ketika pasukan Jawa Timur memasuki desa-desa pasukan Mataram dapat mengepung dan membakar mereka. Akhirnya kekalahan total berpihak pada sekutu sebab banyak pasukan yang gugur dalam peperangan dan sakit akibat kelaparan.

Pada akhir tahun 1616, Mataram mengirim kembali pasukannya untuk menaklukkan daerah Lasem. Sultan Agung menunjuk Martalaya sebagai pimpinan pasukan dalam misi ini. Pasukan yang dibawa merupakan gabungan dari pasukan Mataram sendiri dan pasukan dari Pati. Penaklukkan Lasem begitu mudah karena pihak Lasem sendiri tidak menyerukan adanya penyerangan. Akhirnya seluruh kota dapat dikuasai dan senjata-senjata serta para penduduknya dikumpulkan dan dibagi rata atas Mataram dan Pati (Graaf, 1986).

4. Penaklukkan Pasuruan (1617 M)

Pada tahun 1617 M, Mataram kembali melakukan serangan untuk menaklukkan Pasuruan. Ditunjuklah Tumenggung Martalaya oleh Sultan Agung dalam melaksanakan misi penyerangan terhadap Pasuruan. Pihak Pasuruan telah mengetahui akan ada penyerangan yang dilakukan oleh Mataram terhadap Pasuruan.

Oleh karena itu, Tumenggung Kapulungan mempersiapkan pasukannya untuk menghadang pasukan Mataram.

Penyerangan dimulai pada Kamis malam yang diawali oleh Pasuruan. Namun dapat dihalang oleh Mataram sehingga pasukan Pasuruan menjadi kacau balau. Keesokan harinya, Mataram menyerang kembali kota Pasuruan karena kekuatan Pasuruan sudah melemah akibat menyerang Mataram sendirian tanpa ada bantuan dari daerah lain (Graaf, 1986).

5. Penaklukan Tuban (1619 M)

Sultan Agung melanjutkan misi ekspansi wilayahnya ke Tuban. Sultan Agung memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Martalaya dan Jaya Suponta untuk segera bergerak menuju Tuban. Keberangkatan mereka dimulai dan singgah ke Pati dan Pragola untuk mengikutsertakan kepala wilayah tersebut dalam misi penaklukan Tuban. Pada saat proses penaklukan dimulai, pasukan Tuban mengeluarkan meriamnya di garis depan. Sedangkan pasukan Mataram mengamati pasukan Tuban sampai pasukan Tuban melakukan serangan pertamanya. Keesokan harinya, Tuban melancarkan serangan terhadap Mataram dengan menembakkan meriam sehingga banyak yang tewas dalam serangan tersebut. Pada saat meriam selanjutnya akan ditembakkan, terjadi kesalahan sehingga meriam tersebut tidak bisa digunakan. Kesempatan ini digunakan Mataram untuk menyerang balik Tuban. Keadaan Tuban menjadi kacau balau. Kapal-kapal di pelabuhan diserbu dan ditenggelamkan, keraton mudah dimasuki Mataram tanpa ada perlawanan, banyak harta benda yang dirampas, dan banyak tahanan yang dibawa ke Mataram. Tuban pun jatuh di tangan Mataram dan pasukan Mataram kembali ke Mataram (Graaf, 1986).

6. Penaklukan Surabaya (1620 M)

Surabaya merupakan saingan utama Mataram di Jawa Timur. Memiliki kedudukan di bidang perdagangan sehingga Surabaya kuat di bidang ekonomi dan bidang politik. Karena itu, pengaruh Surabaya cukup kuat di Jawa Timur. Surabaya menjadi pemimpin sebagai aliansi daerah-daerah pesisir di Jawa Timur untuk menghalang pengaruh Mataram di Jawa Timur. Tetapi untuk daerah lainnya yang berada di luar Jawa, daerah tersebut bisa sebagai mitra kerjasama dagang dengan Surabaya atau juga masuk ke dalam aliansi tersebut seperti Sukadana, Landak,

Banjarmasin, dan Maluku selain itu Surabaya juga bekerja sama dengan Belanda (VOC) (Daliman, 2012).

Kemenangan-kemenangan Sultan Agung dalam ekspansinya terhadap beberapa daerah di Jawa Timur membawa pada tujuannya pada Surabaya. Sultan Agung berusaha mematahkan daya tahan Surabaya dengan penyerangan terhadap daerah sekutunya bertahun-tahun secara teratur. Artinya semakin melemah pengaruh kekuasaan di daerah sekutu Surabaya akan melemah juga kekuasaannya. Akan tetapi pertahanan Surabaya sangat kuat dan banyak prajurit yang siap siaga untuk menjawab pertahanan Surabaya (Graaf, 1986). Takluknya Surabaya disebabkan adanya penyerangan berkali-kali oleh Mataram agar tunduk dalam kekuasaan Mataram. Serangan-serangan Mataram ke Surabaya terjadi lima kali. Untuk detailnya akan dijelaskan di bawah ini :

a. Serangan Pertama

Persiapan pasukan Mataram menuju Surabaya dimulai pada tahun 1620 M. Dimana Mataram sudah mempersiapkan banyak prajurit untuk misi menaklukkan Surabaya. Prajurit disiapkan untuk penyerangan baik melalui jalur darat maupun laut. Untuk penyerangan jalur darat, Mataram sudah mempersiapkan sekitar 70.000 prajurit dan jalur laut Mataram. Namun serangan Mataram masih bisa dicegah oleh Surabaya sehingga Surabaya tetap mempertahankan wilayahnya.

b. Serangan Kedua

Sekitar bulan Juli-Agustus 1622, Mataram mengadakan kembali persiapan militer untuk melancarkan serangan ke Surabaya. Tumenggung Tegal turut serta dalam penyerangan ke Surabaya dengan 80.000 pasukan Mataram yang siap menuju Surabaya. Namun pasukan Mataram kembali dan terpaksa tidak melanjutkan serangan akibat kekurangan ketersediaan makanan. Serangan kedua masih belum menaklukkan Surabaya ke tangan Mataram.

c. Serangan Ketiga

Pada tahun 1623 M, Mataram sudah mempersiapkan serangan terhadap Surabaya dengan membuat 30 kapal baru dan besar. Misi penyerangan ini Sultan Agung menunjuk Ki Adipati Mandurareja panglima terkenal dari keturunan Mandokara sebagai panglimanya. Pada awal tahun 1624 M memasuki musim kemarau dan Mataram mengepung Surabaya. Mataram meporak-porandakan Surabaya

melewati jalur darat. Sedangkan pada jalur laut, Mataram menyerang Gresik dengan menyergapnya oleh beberapa kapal, mendarat, dan membakar beberapa tempat di Gresik. Serangan Mataram kali ini belum dikatakan berhasil karena Surabaya masih menerima bantuan dari daerah sekitarnya salah satunya Madura (Graaf, 1986)

d. Serangan Keempat

Pada tahun 1624 M, Mataram dalam misi ekspansinya di Surabaya juga mengadakan ekspansi wilayah ke Madura. Adanya kabar mengenai kedatangan pasukan Mataram ke Madura, akhirnya Pangeran Madura meminta bantuan kepada Pangeran Sumenep, Pangeran Pemekasan, Balega, Pakacangan, dan Pangeran Surabaya. Pasukan Madura sudah bersiap dan berbaris di sepanjang pantai. Kedatangan pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Jaya Suponta disambut dengan segala senjata dan banyaknya prajurit Madura dari daratan. Terjadilah perang antara dua kubu di darat dan di laut dan kekalahan berpihak di Madura (Olthof, 2017).

e. Serangan Kelima

Serangan terakhir sebelum Surabaya akan takluk pada Mataram terjadi pada tahun 1625 M. Pada serangan ini, Mataram dipimpin oleh Tumenggung Mangun Oneng untuk menaklukkan Surabaya. Tumenggung Yudha Prana dan Tumenggung Ketawangan juga diikutsertakan demikian pula orang-orang Sampang juga terdapat pada barisan pasukan Mataram. Teknik pembendungan sungai ini didukung dengan adanya musim kemarau sehingga air yang mengalir juga sedikit. Kemudian aliran air tersebut diisi dengan keranjang-keranjang yang berisikan bangkai dan buah aren yang diikat pada tonggak- tonggak dalam sungai. Akibat pembendungan ini, penduduk Surabaya mengalami penyakit-penyakit menular seperti batuk-batuk, gatal-gatal, demam, dan sakit perut. Akibat dari pembendungan tersebut hingga dirasakan ke kota, Raja Surabaya memanggil seluruh bangsawannya agar merundingkan apakah menyerah atau tetap bertempur. Keputusan yang diambil adalah menyerah pada Mataram (Graaf, 1986).

Strategi Sultan Agung dalam Politik Ekspansi di Wilayah Timur Tanah Jawa

Untuk mencapai keberhasilan dalam misi perluasan wilayah kekuasaan (ekspansi), pastinya dibutuhkan strategi yang tepat agar misi tersebut dapat tercapai

dan terselesaikan sesuai rencana. Seperti halnya Sultan Agung dalam ekspansinya di Jawa Timur yang menggunakan strategi dalam peperangannya untuk mewujudkan kemenangan dalam perluasan wilayah kekuasaannya. Langkah-langkah dalam strategi ekspansi ke Jawa Timur adalah :

1. Memahami Jalan,
2. Memahami Musim dan Cuaca,
3. Menguasai Medan,
4. Memberikan Komando, dan
5. Disipilin pada Aturan atau Arahan dari Pemimpin Perang (Dalminto, 2014).

Selain kelima langkah di atas, Sultan Agung dalam politik ekspansinya menggunakan taktik penyerangan dengan tiga cara, yaitu menghancurkan musuh dan memusnahkan daerah kekuasaan musuh; merampas dan menyerap harta kekayaan musuh; dan mengkombinasikan antara menghancurkan musuh, memusnahkan daerah kekuasaan musuh, dan mengambil alih diplomasi dan administrasi kekuasaan musuh. Taktik penyerangan tersebut sama halnya dengan teknik perang Nusantara. Teknik perang yang dilakukan di darat biasanya dilakukan dengan mengadakan serangan mendadak. Selain serangan mendadak, adapun cara lain dengan memperlambat gerakan musuh seperti memotong pohon-pohon besar untuk menghalangi jalan utama musuh. Adapun cara lain untuk mempersulit musuh adalah dengan menghancurkan atau mengambil alih tempat pembekalan musuh (Poesponegoro, 2010).

Kemudian dalam ekspansi Sultan Agung di Jawa Timur ditemukan sebuah strategi berupa pengepungan. Seperti pada penyerangan Wirasaba, Pasuruan, dan Surabaya Sultan Agung beserta pasukannya menyerang daerah tersebut dengan taktik pengepungan. Taktik pengepungan merupakan salah satu teknik perang di Nusantara. Pembuatan parit-parit dan benteng-benteng di dekat daerah perlawanan musuh adalah caranya. Tujuannya adalah menghadang serangan musuh, memberikan perlindungan dari senjata yang diluncurkan musuh, dan memudahkan untuk memberikan serangan ke daerah lawan. Jika pengepungan akan dimulai, akan ada bunyi-bunyian yang membisingkan dan terengar seperti menakut-nakuti musuh. Keributan ini merupakan tanda penyerangan. Dalam keributan ini, penyerang akan membawa kayu-kayu untuk dijadikan tangga agar dapat memasuki daerah musuh. Di daerah musuh, mereka akan

merusak tembok benteng perlindungan musuh bahkan membakar untuk memusnahkan musuh yang berada di dalam benteng (Poesponegoro, 2010).

SIMPULAN

Kepemimpinan Sultan Agung telah membawa Mataram kepada masa kejayaan. Berkat Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa Sultan Agung telah berhasil mengembangkan secara pesat beberapa bidang dalam kerajaannya seperti politik, perluasan wilayah, ekonomi, dan agama.

Pada tahun 1614 M, Sultan Agung melancarkan serangan militer pertamanya setelah pengukuhan sebagai raja Mataram. Serangan militer ini diluncurkan ke daerah-daerah timur Jawa yang merupakan daerah sekutu Surabaya. Kemudian penaklukan Wirasaba terjadi pada tahun 1615 M. Dilanjutkan pada tahun 1616 M, Mataram mengirim kembali pasukannya untuk menaklukkan daerah Siwalan dan Lasem. Lalu pada tahun 1617 M, Mataram kembali melakukan serangan untuk menaklukkan Pasuruan. Sultan Agung melanjutkan misi ekspansi kembali ke wilayah ke Tuban pada tahun 1619 M., selanjutnya Surabaya menjadi sasaran ekspansi Sultan Agung pada tahun 1620 M.

Untuk mencapai keberhasilan dalam misi perluasan wilayah kekuasaan (ekspansi), pastinya dibutuhkan strategi yang tepat agar misi tersebut dapat tercapai dan terselesaikan sesuai rencana. Seperti halnya Sultan Agung dalam ekspansinya di Jawa Timur yang menggunakan strategi dalam peperangannya untuk mewujudkan kemenangan dalam perluasan wilayah kekuasaannya. Langkah-langkah dalam strategi ekspansi ke Jawa Timur adalah memahami jalan, memahami musim dan cuaca, menguasai medan, memberikan komando, dan disiplin pada turan atau rahan dari pemimpin perang.

REFERENSI

- Abimanyu, Seodjipto. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Jakarta: Saufa, 2015.
- Abimanyu, Seodjipto. *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Daliman. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

- Dalminto. *Strategi Sultan Agung Dalam Ekspansi Serta Islamisasi Pada Kerajaan Mataam Islam*, Disertasi, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, IAIN Raden Fatah Palembang, 2014.
- Graaf, De. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Pustaka Grafitifers, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT.Gramedia, 1992.
- Olthof, W.L. *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Narasi, 2017.
- Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Purwadi. *Babad Ki Ageng Mangir: Intrik Politik Istana Demi Melanggengkan Kuasa Keraton Mataram*. Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Riklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Subartardjo, R.M. *Pahlawan Nasional: Sultan Agung Hanyakrokusumo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2016.
- Yudiatmaja, EkoWahyu. *Politisasi Biokrasi: Pola Hubungan Politik dan Biokrasi di Indonesia*, Jurnal Administrasi Negara (JUAN), Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015.